

## **ANALISIS MANAJEMEN PELAKSANAAN PADA KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT DI GEDUNG PERKANTORAN X**

**Maulana Said Handayana, Suroto, Bina Kurniawan**

Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Diponegoro

Email : handayana.hse@gmail.com

**Abstract :** Office building X has an area of 52 753 m<sup>2</sup> with a height of 120 m. As a multi-storey building, of course, office building X has a wide range of risk emergencies. This study aims to analyze the management of implementation on preparedness and emergency response in the office building X. This research is a descriptive qualitative in-depth interviews. The subject of this research consists of 5 person as the main informants and 3 person as the informant triangulation. The results showed that the management of office buildings X already have policies and commitments in terms of preparedness and emergency response. This is indicated by the emergency response procedures, the top management support such as funding and systemic policy, the emergency response organizations, the emergency communications, the emergency response infrastructure, the transportation of emergency response, the emergency response training, the emergency response simulation and evaluation of emergency response procedures. But the management of office buildings X doesn't have a program for hazard identification and risk assessment, the emergency response procedures is not contain of information about protection facilities and equipment available as well as the duties and responsibilities of emergency response organizations, there are tenants which has not obtain information related to emergency response procedures, procedure has not been set for the recovery of labor conditions or facilities that were damaged, the top management has not actively participate in simulated emergencies, emergency response organization is not consist of building occupants and building managers, unavailability of backup emergency vehicles, unavailability of stretcher and evacuation chair, assembly point which can not accommodate all the building occupants, the recapitulation process of building occupants were evacuated when simulating emergencies requires a long time. The management of office buildings X should complement existing emergency response procedures as well as reviewing other supporting facilities such as the support of top management, emergency response organizations, emergency response infrastructure, emergency response transportation and emergency response training.

**Key Words :** muti-storey building, preparedness and emergency response

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah populer dengan sebutan K3, dewasa ini implementasinya telah menyebar secara luas di hampir setiap sektor. Keselamatan dan Kesehatan Kerja didefinisikan sebagai suatu upaya perlindungan agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja senantiasa dalam keadaan yang sehat dan selamat serta sumber-sumber proses produksi dapat dijalankan secara aman, efisien dan produktif.<sup>(1)</sup> Secara legal, Pemerintah Indonesia telah mewajibkan kepada setiap pengusaha untuk memenuhi aspek keselamatan kerja di segala tempat kerja yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Dasar pertimbangan pemenuhan aspek keselamatan kerja tidak hanya ditujukan untuk tenaga kerja tetapi untuk semua orang yang berada di tempat kerja, seperti yang tertuang dalam pertimbangan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaannya, setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya dan setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.<sup>(2)</sup>

Salah satu upaya pemenuhan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja berada di bangunan gedung perkantoran.

Bangunan gedung perkantoran adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan perkantoran. Bangunan gedung perkantoran yang selama ini relatif aman, sebenarnya dihadapkan dengan berbagai risiko bahaya keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, banjir dan lain-lain. Potensi bahaya ini dianggap kecil oleh sebagian besar pemilik, pengelola maupun penghuni bangunan gedung perkantoran, karena kegiatannya hanya perkantoran, sehingga perencanaan dan persiapan untuk menghadapi keadaan darurat relatif diabaikan. Kondisi lain adalah, jika terjadi keadaan darurat semua penghuni bangunan gedung perkantoran mengalami kepanikan dan tidak dapat merespon dengan cepat karena tidak memahami apa yang harus dilakukan.<sup>(3)</sup>

Keadaan darurat di bangunan gedung perkantoran dapat menyebabkan kerugian materil dan korban jiwa yang sangat besar. Sebagai contoh adalah data statistik kejadian kebakaran tahun 2004-2009, berdasarkan data dari Dinas Kebakaran DKI Jakarta menunjukkan bahwa potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung umumnya dan gedung perkantoran pada khususnya merupakan ancaman yang serius karena menimbulkan kecelakaan dan kematian serta kerugian yang cukup besar. Dari data tersebut terlihat bahwa frekuensi

kebakaran tahun 2004-2009 sangat tinggi yaitu antara 103 sampai dengan 205 kali kejadian per tahun, jumlah korban jiwa meninggal dunia antara 13 sampai dengan 38 orang per tahun, jumlah korban luka 35 sampai dengan 85 orang per tahun dengan kerugian material antara 119 sampai dengan 226 milyar rupiah per tahun.<sup>(3)</sup>

Hasil survey pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, gedung perkantoran X berlokasi di Jalan Let Jend TB Simatupang Jakarta Selatan. Daerah TB Simatupang dikenal sebagai kawasan pusat bisnis potensial di Jakarta dengan permintaan yang besar dari pemilik bisnis dan perusahaan yang ingin memiliki kantor di daerah ini. Gedung perkantoran X termasuk gedung perkantoran eksklusif dengan beberapa fasilitas yang ada di dalamnya seperti bank, *atm center*, *food court*, kafe, kolam renang, *gym* dan area parkir yang dapat menampung 800 unit kendaraan bermotor. Luas per lantai di gedung perkantoran X berkisar 1000 m<sup>2</sup> dengan 29 lantai dan ketinggian lebih dari 40 meter. Gedung perkantoran X memiliki 8 lift yang diperuntukkan untuk penghuni dan pengunjung dan 2 lift yang diperuntukkan untuk operasional gedung. Penghuni atau penyewa yang ada di gedung perkantoran X terdiri dari perusahaan yang beragam mulai dari perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, kesehatan, perbankan

sampai minyak dan gas. Dalam hal kesiapsiagaan dan tanggap darurat manajemen gedung perkantoran X memiliki sebuah sistem manajemen kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang harus diketahui dan dipatuhi oleh setiap penghuni dan pengunjung. Sistem tersebut berupa prosedur tanggap darurat yang dinamakan *tenant emergency procedures* dan beberapa lampiran yang menunjang. Sarana/prasarana kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang ada di gedung perkantoran X terdiri dari tangga darurat, *sprinkler*, *detector*, *alarm*, APAR, hidran, area berkumpul dan *crisis management center*.

Prosedur tanggap darurat harus memberikan beberapa pertimbangan yaitu identifikasi potensi situasi darurat dan lokasi, rincian tindakan yang akan diambil oleh personel selama keadaan darurat, prosedur evakuasi, tanggung jawab dan wewenang personil dengan peran khusus selama keadaan darurat, hubungan dan komunikasi dengan layanan darurat, komunikasi dengan karyawan, pemerintah dan pihak lain yang berhubungan dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tanggap darurat.<sup>(4)</sup> Prosedur tanggap darurat yang ada di gedung perkantoran X (*tenant emergency procedures*) tidak menjelaskan tanggung jawab dan wewenang personil dengan peran khusus (*emergency response team*) selama keadaan darurat, hal ini akan

berdampak pada ketidaksiapan dari *emergency response team* di gedung perkantoran X dalam menghadapi keadaan darurat.

Sarana/prasarana tanggap darurat sangat diperlukan untuk penyelamatan penghuni bangunan dan aset gedung perkantoran. Adapun prasarana yang dibutuhkan adalah sarana jalan keluar bagi penghuni bangunan, sarana jalur masuk mobil pemadam kebakaran/ambulan, lapis perkerasan, area berkumpul, pos komando teknis. Sedangkan sarana yang dibutuhkan antara lain hidran halaman, hidran gedung, air yang cukup minimal untuk pemadaman 30 menit, APAR, sistem alarm, detektor, blower bertekanan untuk tangga darurat.<sup>(3)</sup> Sarana tanggap darurat di gedung perkantoran X belum terdapat tandu dan kursi evakuasi, hal ini akan berdampak pada keefektifan tim tanggap darurat dalam mengevakuasi penghuni gedung yang mempunyai keterbatasan fisik.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis berkeinginan untuk mengetahui sampai sejauh mana kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat di gedung perkantoran X.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan observasional dan wawancara mendalam.

Informan utama pada penelitian ini adalah pihak yang terlibat langsung dalam manajemen kesiapsiagaan dan tanggap darurat di gedung perkantoran X yaitu seorang *General Manager*, seorang *Building Manager*, seorang *Deputy Building Manager*, seorang *Chief Security* dan seorang *Chief Engineering*. Informan triangulasi adalah tiga orang *Floor Warden* dari perwakilan perusahaan penyewa (*tenant*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Penyusunan Prosedur Tanggap Darurat dan Penyusunan Rencana Simulasi Keadaan Darurat

Evaluasi potensi bahaya merupakan langkah awal dalam mengembangkan manajemen resiko K3. Evaluasi bahaya merupakan upaya sistematis untuk mengetahui adanya bahaya dalam aktivitas organisasi.<sup>(5)</sup> Dari wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan didapatkan hasil yaitu manajemen gedung perkantoran X belum belum mengerti apa yang dimaksud dengan evaluasi potensi bahaya dan metode apa yang dipakai untuk melakukan evaluasi bahaya/penilaian risiko

Manajemen gedung perkantoran X sudah memiliki prosedur tanggap darurat sebagai pedoman untuk menghadapi keadaan darurat. Akan tetapi terdapat pekerja dan perusahaan penyewa yang belum mendapatkan informasi terkait prosedur tanggap darurat karena tidak mendapatkan sirkulasi *email* dari *Deputy Building Manager*.

Prosedur tanggap darurat harus jelas dan ringkas untuk memudahkan penggunaannya dalam situasi darurat.<sup>(4)</sup> Berdasarkan data yang diperoleh peneliti didapatkan hasil yaitu prosedur tanggap darurat yang ada di gedung perkantoran X (*tenant emergency procedures*) hanya tersedia dalam bahasa Inggris, hal ini akan berdampak pada kesulitan yang akan dialami oleh para penghuni dan pengunjung yang tidak mahir berbahasa Inggris untuk menggunakannya dalam situasi darurat.

Prosedur tanggap darurat yang ideal memuat antara lain informasi potensi bahaya, informasi sarana dan peralatan proteksi yang tersedia, organisasi tugas dan tanggung jawabnya, sistem pemberitahuan dan notifikasi, memuat prosedur tindakan menghadapi keadaan darurat disesuaikan dengan jenisnya, pengaturan sistem komando darurat dan koordinasi secara internal dan eksternal dan lain lain.<sup>(3)</sup> Berdasarkan data yang diperoleh peneliti didapatkan hasil yaitu prosedur tanggap darurat yang sudah

ditetapkan oleh manajemen gedung perkantoran X tidak memuat informasi sarana dan peralatan proteksi yang tersedia serta tugas dan tanggung jawab dari organisasi tanggap darurat.

Tujuan dari simulasi keadaan darurat adalah agar tim tanggap darurat dan semua penghuni gedung memahami dan terlatih dalam menghadapi keadaan darurat serta untuk memastikan semua sarana/peralatan darurat selalu dalam keadaan siap pakai dan berfungsi dengan baik. Agar pelaksanaan simulasi darurat berjalan baik, perlu disiapkan skenario kejadian secara rinci yang memuat siapa berbuat apa dari sistem/peralatan/sarana yang digunakan.<sup>(3)</sup> Manajemen gedung perkantoran X sudah membuat skenario untuk menyusun simulasi keadaan darurat.

#### **Analisis Dukungan *Top Management***

Keterlibatan *top management* secara aktif akan dapat memberikan perubahan-perubahan fundamental dalam perilaku menghadapi keadaan darurat bagi semua karyawan maupun penghuni bangunan gedung perkantoran. Perubahan perilaku memerlukan waktu, dengan komitmen yang kuat dari *top management* akan menjadi katalisator yang positif terhadap perubahan perilaku.<sup>(3)</sup> *Top management* gedung perkantoran X belum sepenuhnya berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan simulasi keadaan darurat.

### Analisis Organisasi Tanggap Darurat

Organisasi tanggap darurat adalah pengelompokan orang-orang serta penetapan tugas masing masing dengan tujuan terciptanya aktifitas yang berkaitan dengan kedaruratan. Sesuai dengan tujuan tersebut organisasi tanggap darurat pada bangunan gedung perkantoran sebaiknya terdiri dari unsur pengelola bangunan dan penghuni bangunan.<sup>(3)</sup> Berdasarkan data yang diperoleh peneliti didapatkan hasil yaitu organisasi tanggap darurat belum terdiri dari unsur pengelola bangunan dan penghuni bangunan.

### Analisis Komunikasi Tanggap Darurat

sarana komunikasi darurat yang diperlukan terdiri dari panggilan terbatas dan panggilan umum.<sup>(3)</sup> Panggilan terbatas adalah panggilan yang ditujukan kepada personil tanggap darurat saja, dengan berbagai macam metode seperti telepon biasa atau *handy talki*.<sup>(3)</sup> Dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan didapatkan hasil yaitu untuk sarana panggilan terbatas manajemen gedung perkantoran X menggunakan *handy talki*.

Panggilan umum berfungsi untuk memberikan informasi darurat ke semua penghuni bangunan baik dalam gedung maupun di luar gedung. Media yang bisa dipakai biasa menggunakan sistem *alarm* atau tanda khusus dilanjutkan dengan

pemberitahuan tentang kondisi darurat kepada semua penghuni gedung.<sup>(3)</sup> Berdasarkan data yang diperoleh peneliti didapatkan hasil yaitu komunikasi darurat yang dilakukan manajemen gedung perkantoran X ke penghuni yang berada di dalam gedung menggunakan *alarm* dan *public announcement* hal tersebut senada dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan yaitu pelaksanaan komunikasi internal tanggap darurat yang dilakukan manajemen gedung perkantoran X yaitu dengan menggunakan *speaker* yang ada di setiap lantai.

### Analisis Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat

Sarana/prasarana darurat sangat diperlukan untuk penyelamatan penghuni bangunan dan aset gedung perkantoran. Adapun prasarana yang dibutuhkan adalah sarana jalan keluar bagi penghuni bangunan, sarana jalur masuk mobil pemadam kebakaran/ambulan, lapis perkerasan, area berkumpul, pos komando teknis. Sedangkan sarana yang dibutuhkan antara lain hidran halaman, hidran gedung, air yang cukup minimal untuk pemadaman 30 menit, APAR, sistem *alarm*, detektor, blower bertekanan untuk tangga darurat. Dalam menanggulangi keadaan darurat juga diperlukan peralatan perseorangan seperti *megaphone*, SCBA, lampu senter, baju

pemadam, tandu, perkakas alat bantu pemadam (kapak, linggis dll) dan kursi evakuasi.<sup>(3)</sup>

Organisasi harus menentukan dan menilai bagaimana situasi darurat akan berdampak pada semua orang di dalam dan/atau di sekitar tempat kerja yang dikendalikan organisasi. Pertimbangan harus diberikan kepada mereka yang memiliki kebutuhan khusus misalnya orang-orang dengan mobilitas, penglihatan dan pendengaran terbatas. Hal ini dapat mencakup karyawan, pekerja sementara, karyawan kontrak atau pengunjung.<sup>(4)</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti sarana/prasarana evakuasi yang ada di gedung perkantoran X belum memadai. Manajemen gedung belum menyediakan tandu dan kursi evakuasi. Hal tersebut akan berdampak pada keefektifan tim tanggap darurat gedung dalam mengevakuasi penghuni gedung yang terluka atau yang mempunyai keterbatasan fisik.

#### **Analisis Transportasi Tanggap Darurat**

Transportasi yang terkait dengan penanggulangan keadaan darurat adalah sarana transportasi korban kecelakaan untuk segera dibawa ke rumah sakit seperti kendaraan mobil ambulans dan kendaraan cadangan ketika dibutuhkan dalam keadaan darurat.<sup>(3)</sup>

Manajemen gedung perkantoran X sudah bekerja sama dengan PMI setempat untuk menyediakan sarana transportasi darurat yaitu ambulans yang digunakan untuk membawa penghuni gedung yang memerlukan pertolongan ke rumah sakit.

#### **Analisis Pelatihan Tanggap Darurat**

Suatu organisasi/perusahaan harus memastikan bahwa setiap orang dalam pengendaliannya yang melakukan tugas-tugas yang mempunyai dampak pada K3 harus kompeten sesuai dengan tingkat pendidikan, pelatihan/atau pengalaman dan menyimpan catatan-catatannya. Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk memastikan semua orang yang bekerja dalam pengendaliannya peduli akan peranan dan tanggung jawabnya dalam mencapai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur-prosedur K3 dan persyaratan sistem manajemen K3, termasuk persyaratan kesiapsiagaan dan tanggap darurat.<sup>(4)</sup>

Manajemen gedung perkantoran X sudah melakukan berbagai macam pelatihan terkait penanggulangan keadaan darurat seperti pelatihan *fire fighting* dan *first aid* bagi seluruh anggota tim tanggap darurat. Pelatihan tersebut diberikan berdasarkan identifikasi potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi. Akan tetapi pihak manajemen gedung

belum memberikan pelatihan terkait penanggulangan keadaan darurat kepada semua *floor warden*. Hal ini akan berdampak pada keefektifan dalam penanggulangan keadaan darurat di gedung perkantoran X.

### **Analisis Simulasi Keadaan Darurat**

Keadaan darurat tidak bisa diketahui kapan dan dimana akan terjadinya, namun yang ada adalah bagaimana kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat maka diperlukan simulasi keadaan darurat yang disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di bangunan gedung tersebut dalam keadaan darurat. Oleh karena itu dalam menyusun simulasi keadaan darurat perlu dibuat skenario keadaan darurat terlebih dahulu.<sup>(3)</sup>

Manajemen gedung perkantoran X sudah membuat skenario tanggap darurat sebelum melakukan simulasi keadaan darurat

### **Analisis Evaluasi Prosedur Tanggap Darurat**

Tujuan dari evaluasi prosedur tanggap darurat adalah untuk mengidentifikasi kelemahan sistem tanggap darurat yang ada guna perbaikan dalam kesiapsiagaan tanggap darurat. Prosedur tanggap darurat dapat dievaluasi setelah simulasi

keadaan darurat, pasca kejadian darurat ataupun jika terjadi perubahan sistem dan struktur yang ada di gedung perkantoran.<sup>(3)</sup>

Manajemen gedung perkantoran X melakukan evaluasi prosedur tanggap darurat setelah simulasi keadaan darurat

### **KESIMPULAN**

1. Terdapat beberapa kekurangan terkait perencanaan kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Pertama, manajemen gedung perkantoran X belum memiliki program untuk identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Kedua, prosedur tanggap darurat yang sudah ditetapkan oleh manajemen gedung perkantoran X tidak memuat informasi sarana dan peralatan proteksi yang tersedia serta tugas dan tanggungjawab dari organisasi tanggap darurat. Ketiga terdapat perusahaan penyewa dan pekerja yang tidak mendapatkan informasi terkait prosedur tanggap darurat. Keempat, belum ditetapkan prosedur terkait rencana pemulihan keadaan darurat.
2. Bentuk dukungan partisipasi aktif yang diberikan oleh *top management* belum optimal hal ini dikarenakan *top management* belum pernah mengikuti kegiatan simulasi keadaan darurat secara langsung.
3. Organisasi tanggap darurat di gedung perkantoran X tidak terdiri dari unsur

- penghuni bangunan dan pengelola bangunan. Penghuni gedung hanya dilibatkan sebagai *floor warden* yang berasal dari perwakilan dari setiap perusahaan penyewa di setiap lantainya. Akan tetapi rasio jumlah *floor warden* dengan jumlah penghuni per lantai tidak sebanding.
4. Komunikasi tanggap darurat di gedung perkantoran X terdiri dari panggilan terbatas dan panggilan umum. Sarana panggilan terbatas menggunakan *handy talki* sedangkan sarana panggilan umum untuk internal gedung menggunakan *alarm* dan *public announcement*.
  5. Sarana/prasarana yang belum dimiliki oleh manajemen gedung adalah tandu dan kursi evakuasi. Hal yang harus diperhatikan juga oleh manajemen gedung adalah akses menuju pintu darurat yang berada di setiap lantai sering terhalang sesuatu seperti galon air atau tempat sampah.
  6. Manajemen gedung perkantoran X belum memiliki kendaraan cadangan jika sewaktu waktu dibutuhkan dengan segera. Untuk kendaraan darurat cadangan setiap perusahaan penyewa sebenarnya bisa menggunakan mobil operasional yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, akan tetapi tidak semua perusahaan memiliki mobil operasional tersebut.
  7. Manajemen gedung sudah melakukan berbagai macam pelatihan terkait penanganan keadaan darurat seperti pelatihan *fire fighting* dan *first aid* bagi seluruh anggota tim tanggap darurat. Akan tetapi manajemen gedung perkantoran X belum memberikan pelatihan terkait penanganan keadaan darurat kepada semua *floor warden*.
  8. Simulasi keadaan darurat yang dilakukan oleh manajemen gedung perkantoran X berdasarkan prosedur tanggap darurat terkait *building evacuation*. Terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan simulasi keadaan darurat yaitu tempat *assembly point* yang belum bisa menampung seluruh penghuni gedung dan proses rekapitulasi jumlah penghuni yang dievakuasi membutuhkan waktu yang lama.
  9. Evaluasi prosedur tanggap darurat dilakukan setelah kegiatan simulasi keadaan darurat, Evaluasi prosedur tanggap darurat dilakukan oleh pihak manajemen gedung dan perusahaan penyewa. Pertimbangan dalam melakukan evaluasi adalah masukan dari perusahaan penyewa, evaluasi simulasi keadaan darurat dan perubahan struktur bangunan gedung.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Tarwaka. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen Implementasi K3 di*

*Tempat Kerja.* Harapan Press.  
Surakarta. 2008

2. Presiden Republik Indonesia. *Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tentang Keselamatan Kerja.* Jakarta. 1970
3. Direktorat Bina Kesehatan Kerja, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Kesiapsiagaan Tanggap Darurat di Perkantoran.* Jakarta. 2010
4. British Standard Institution. *BS OHSAS 18002 Occupational Health Safety Management System – Guidelines for Implementation OHSAS 18001:2007.* 2008
5. Ramli, Soehatman. *Pedoman Praktis Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3.* Dian Rakyat. Jakarta. 2010

